KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT BADAN USAHA**	**Nomor SOP**	:	**AHU-57.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	:	**16 Desember 2024**
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	**24 Februari 2025**
	Disahkan Oleh		**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** **Widodo**
	NAMA SOP		**: PENCATATAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 2. Memahami ketentuan pendirian Persekutuan Perdata 3. Memahami akses SA=BU www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pesan Nama Persekutuan Perdata 2 SOP Pendaftaran Pendirian Persekutuan Perdata 3 SOP Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata 4 SOP Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata 5 SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Persekutuan Perdata 3. Printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pencatatan pendaftaran dan keterangan yang disampaikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCATATAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN PERDATA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Usaha	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pencatatan perubahan Persekutuan Perdata dilakukan pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha www.ahu.go.id			a. Akta Perubahan Persekutuan Perdata; b. bukti pendaftaran pengadilan negeri.	*Real time*		Permohonan dapat dilakukan Notaris.
2	Mengunduh salinan akta perubahan Persekutuan Perdata dan bukti pendaftaran pengadilan negeri dalam Sistem Administrasi Badan Usaha			a. Akta Perubahan Persekutuan Perdata; b. bukti pendaftaran pengadilan negeri.	*Real time*		
3	Mencetak Surat Keterangan Terdaftar tentang pencatatan perubahan Persekutuan Perdata				*Real time*	Surat Keterangan Terdaftar tentang Pencatatan Perubahan Persekutuan Perdata	Surat Keterangan Terdaftar tentang Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata diterima dalam bentuk softcopy yang dapat didownload dan dicetak oleh Pemohon (Notaris).